

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2022–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah belum mampu memengaruhi probabilitas pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai proksi kualitas laporan keuangan.
2. Tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah belum mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas sumber daya manusia tidak mampu memperkuat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia belum terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.
4. Kualitas sumber daya manusia tidak mampu memperlemah pengaruh negatif tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum mampu memoderasi hubungan antara tekanan fiskal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian hanya menggunakan pemerintah provinsi di Indonesia sebagai objek penelitian sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada pemerintah kabupaten dan kota.
2. Periode penelitian hanya mencakup tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2022–2024, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikategorikan menjadi variabel dummy. Pengukuran tersebut menyebabkan variasi data relatif terbatas karena sebagian besar pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Variabel independen dan variabel moderasi dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambahkan pemerintah kabupaten/kota atau memperpanjang periode pengamatan sehingga diperoleh variasi data yang lebih besar.
2. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan proksi lain dalam mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), tingkat pengungkapan laporan keuangan, atau

indikator lain yang relevan sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, maupun faktor tata kelola pemerintahan.